

SINOPSIS

Hasan Al Banna adalah salah satu tokoh pemikir Islam yang memandang bahwa politik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keutuhan Islam. Menurut Hasan Al Banna pemerintah yang baik akan terwujud apabila ditopang oleh kelembagaan politik yang sesuai dengan ajaran Islam. Kelembagaan politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

Penelitian ini mengkaji pemikiran Hasan Al Banna tentang politik dan mengambil fokus pada konsep kelembagaan politik. Penelitian ini juga mengkaji dasar pemikiran Hasan Al Banna tentang kelembagaan politik dengan jalan melihat secara makro keadaan sosial dan politik yang mempengaruhi pemikirannya serta pemikir atau tokoh-tokoh sebelumnya yang mempengaruhi Hasan Al Banna.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan filsafat hermeneutika. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi pustaka. Kajian studi pustaka yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian isi teks dengan olahan filosofis teoritis. Bentuk kajian ini digunakan untuk mengetahui ide-ide dan pemikiran tokoh dan juga digunakan untuk mengetahui biografi dalam telaah historis.

Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut, kelembagaan politik yang diharapkan Hasan Al Banna adalah kelembagaan politik harus mampu menjadi kontrol berjalannya pemerintahan dan sebagai sarana partisipasi politik bagi masyarakat. Konsep kelembagaan politik ini merupakan salah satu sarana dan strategi yang dibuat Hasan Al Banna untuk mengembalikan perwujudan pemerintahan Islam di dunia. Hasan Al Banna tidak mempermasalahkan bentuk dan nama lembaga, tetapi yang harus ada dalam kelembagaan politik ada tiga prinsip yaitu tanggung jawab pemerintah, persatuan umat, dan menghargai aspirasi rakyat. Sistem yang ditekankan Hasan Al Banna adalah Sistem Republik Parlementer dengan penekanan kehendak rakyat sebagai sumber kekuasaan. Hasan Al Banna tidak membatasi bidang-bidang dalam penyelenggaraan negara, tetapi secara umum sistem politik Islam kekuasaan negara meliputi beberapa bidang yaitu: eksekutif, legislatif, yudikatif, kontrol dan evaluasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kelembagaan politik yang efektif dalam penyelenggaraan negara serta dapat dijadikan alternatif kelembagaan bagi negara yang sedang mencari format ideal.